

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Empiris Di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

WIRNA SUWARI

NIM: 181000462201015

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2022

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Empiris Di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)

WIRNA SUWARI

NIM: 181000462201015

Pembimbing: 1. Hj. NIDIA ANGGRENI DAS, S.E., M.M.

2. RITA DWI PUTRI, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y), Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat (X1) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $3,623 > 1,665$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,001 < 0,05$. sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $3,973 > 1,665$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$. Setelah itu, Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil ini dibuktikan dengan F_{hitung} sebesar $45,330 > 3,12$. dan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)

**THE EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION AND
ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON
COMMUNITY EMPOWERMENT IN VILLAGE FUND MANAGEMENT**

(Empirical Study in Nagari, Junjung Sirih District, Solok Regency)

WIRNA SUWARI

NIM: 181000462201015

Advisor: 1. Hj. NIDIA ANGGRENI DAS, S.E., M.M.

2. RITA DWI PUTRI, S.E., M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Community Participation (X1) on Community Empowerment in Village Fund Management (Y), the Effect of Village Fund Management Accountability (X2) on Community Empowerment in Village Fund Management (Y). The results showed that Community Participation (X1) had an effect on Community Empowerment in Village Fund Management (Y). This result is evidenced by the tcount of $3,623 > 1,665$ and the significance value of t is $0,001 < 0,05$. while Accountability of Village Fund Management (X2) affects Community Empowerment in Village Fund Management (Y). This result is evidenced by the tcount of $3,973 > 1,665$ and the significance value of t is $0,000 < 0,05$. After that, the Effect of Community Participation (X1), Village Fund Management Accountability (X2) have a simultaneous effect on Community Empowerment in Village Fund Management (Y). This result is proven by Fcount of $45,330 > 3,12$. and the significance value of F is $0,000 < 0,05$.

Keywords: Community Participation (X1), Village Fund Management Accountability (X2), Community Empowerment in Village Fund Management (Y)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh seorang kepala desa. apabila dibandingkan dengan kelurahan maka dapat dijelaskan bahwa desa bukan bawahan dari kecamatan karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukan bagian dari perangkat daerah, sedangkan kelurahan secara struktural merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan kelurahan, desa mempunyai hak mengatur wilayahnya dengan lebih luas dan seluasnya. Dapat kita ketahui bahwa hampir semua penduduk di Indonesia rata-rata bertempat tinggal di pedesaan, untuk itu desa memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatur, meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa juga membutuhkan biaya. Biaya tersebut bersumber dari pendapatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang termasuk sumber pendapatan desa yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan

sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan oleh desa secara mandiri. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang akan menjadikan masyarakat memiliki kreatifitas dan aktif dalam menciptakan peluang pekerjaan atau perbaikan perekonomian

desa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Berkaitan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Dengan adanya masyarakat yang berdaya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, memperdayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih aktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan desa karena anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah atau desa yang bersangkutan. sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan Negara. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pemerintah desa meminta pendapat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas pengelolaan dana desa tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif publik terhadap program yang diadakan pemerintah, yang ditujukan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya wewenang (Sugartini & Hutnaleotina, 2021). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, Namun masyarakat

juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Selain partisipasi masyarakat, akuntabilitas merupakan suatu unsur utama yang harus ada dalam pemerintahan yang baik. Maka, akuntabilitas di dalam pemerintahan sangat diperlukan karena sebagai penunjang otonomi desa agar dapat berjalan dengan sesuai. Akuntabilitas syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem pengelolaan dana desa, akuntabilitas dimaksudkan juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Akuntabilitas dapat membantu pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien. Prinsip dari akuntabilitas sendiri ialah melaporkan tiap aktivitas serta hasil dari aktivitas tersebut yang wajib dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber Pendapatan di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong-royong masyarakat dan pendapatan asli desa lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 1 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021, di Nagari Muaro Pingai memperoleh dana desa tahun 2021 sebanyak Rp. 821.261.000 dan di Nagari Paninggahan memperoleh Dana Desa Tahun 2021 sebanyak Rp. 1.854.398.000.

Berdasarkan fakta yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, yaitu terbatasnya pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dari Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas mempengaruhi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang (Ardiyanti, 2019). Selain itu hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung (Sriani, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok .

2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam melakukan pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Nagari Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam Pengelolaan Dana Desa.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini bagi atas lima bab, dimana masing-masing bab berbagai atas sub bab sesuai dengan kebutuhan pembahasan dan secara garis besarnya masing-masing bab akan membahas hal-hal sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri landasan teori-teori yang berkaitan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai: Jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan teknik pengukuran data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penelitian.



dana desa, dan bisa berdampak pada perekonomian masyarakat desa yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (X1) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) di seluruh Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,623 > t_{tabel}$ 1,665 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih sangat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih, oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang

aktif sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan aktifnya partisipasi masyarakat seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih terhadap pengelolaan dana desa, maka akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan bisa berdampak pada perekonomian masyarakat desa yang lebih baik.

2. Hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) di seluruh Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan nilai ketentuan $t_{tabel} = 1,665$ yaitu t_{hitung} sebesar $3,973 > 1,665$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas seperti pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di seluruh nagari Kecamatan Junjung Sirih, karena dana desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/nagari, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting. Dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pemberdayaan masyarakat bisa meningkat dan bisa menciptakan pertanggung jawaban masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dana desa yang bersih dan akuntabel.

3. Hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (X1) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) di seluruh Nagari Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Hal ini dibuktikan dengan dengan nilai ketentuan $F_{tabel} = 3,12$, yaitu F_{hitung} sebesar $45,330 > 3,12$. Selain itu, hipotesis ketiga dapat dibuktikan dengan ketentuan nilai signifikansi sebesar $0,05$, yaitu nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih sangat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih, oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas seperti pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di seluruh nagari Kecamatan Junjung Sirih, karena dana desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/nagari, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting. Dengan aktifnya partisipasi masyarakat seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih terhadap pengelolaan dana desa, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Nagari Kecamatan Junjung Sirih, maka akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen yang dapat dijadikan sebagai variabel dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, karena sangat memungkinkan faktor lain yang dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi Pemerintah Nagari di seluruh Nagari di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, untuk dapat mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel, agar pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dalam dana desa di setiap Nagari di Kecamatan Junjung Sirih dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Bagi seluruh masyarakat di setiap Nagari di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa, agar pemberdayaan masyarakat meningkat dan perekonomian masyarakat bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 1–127.
- Bangan, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah: Konsep, Teori, Dan Fenomena Di Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Bastian. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. elangga: Jakarta.
- BPS Kabupaten Solok. (2020). *Kecamatan Junjung Sirih Dalam Angka*. Arosuka: BPS Kabupaten Solok
- Dwiyatna, B. H. (2021). *Pengaruh prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi terhadap pengelolaan dana desa*.
- Ferdinand, A. (2014). *metode penelitian manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Firhan, Afrah Junita, T. M. (2020). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Partisipasi*. 4(1), 170–180.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 (Edisi Sembilan)*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuswanti & Kurnia. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Marta & Dewi. (2021). *Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa kediri kecamatan kediri kabupaten tabanan*. *Jurnal*.

- Matia Andriani. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)*.
- Pebrianti & Gema Midata. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Sumobito (studi kasus pada desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. Undergraduate thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* . (2014). Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :49/PMK.07/2016. (n.d.). Tentang Tata Cara Pengalokasian , Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. (n.d.). Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Pratiwi, Y. N. (2020). *Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap*. 24–29.
- Purnama, A. K. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bukit Sari* <http://repository.stieykpn.ac.id/1385/>.
- Razak, T. S. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222
- Rusdiana & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian (E. Dulwahab & T. Nurhayati (Eds); 1 st ed)*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD.
- Safyuddin, Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan : (Vol. 31, Issue 2)*..
- Sekaran, U. (2013). *Edisi 5, Research Methods for Business. A Skill Building Approach*. New York:John Wiley@Sons.
- Setiawan, D., & Kurniasih, N. C. (2021). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 55. Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama, 12(April), 55–64*.
- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. FUKUSMEDIA. Bandung.
- Sriani, N. M. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)*.
- Sugiartini, N. K., & Hutnaleotina, P. N. (2021). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2021. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1, 93–119*..
- Sugiyono, P. . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. bandung: Alfabeta
- Syafi'i, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)*. E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.